

## PENERAPAN UU NO. 14/2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PADA SITUS BADAN PUBLIK BIDANG PENDIDIKAN

Nova Rijati<sup>1</sup>, Budi Widjajanto<sup>2</sup>, Dewi Agustini Santoso<sup>3</sup>

<sup>1,3</sup>Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Dian Nuswantoro

<sup>2</sup>Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Dian Nuswantoro

Jl. Nakula I No. 5-11, Semarang 50131

Telp : (024) 3517261, Fax : (024) 3520165

E-mail: [novaola@yahoo.com](mailto:novaola@yahoo.com)<sup>1</sup>, [budi-w@dinus.ac.id](mailto:budi-w@dinus.ac.id)<sup>2</sup>, [dewi.agustini@dsn.dinus.ac.id](mailto:dewi.agustini@dsn.dinus.ac.id)<sup>3</sup>

---

### **Abstrak**

*Penelitian ini bertujuan membangun peta layanan informasi publik berbasis teknologi informasi bidang pendidikan berdasarkan UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Metode penelitian yang digunakan action research dengan melakukan observasi situs badan publik bidang pendidikan dengan memetakan konten informasi pada menu/sub menu berdasarkan Permendiknas No 50 tahun 2011 tentang layanan informasi publik di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan menentukan konten informasi publik yang sesuai UU No 14/2008. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diketahui bahwa dari 58 item informasi publik yang harus disediakan, ternyata hanya terdapat 17 item (29%) sehingga masih terdapat 71% item informasi publik yang belum tersedia, serta sifat situs [www.kopertis6.or.id](http://www.kopertis6.or.id) dalam memberikan layanan informasi publik masih sebatas menampilkan, namun belum memberikan layanan yang bersifat interaktif.*

**Kata kunci:** informasi publik, situs, Kopertis 6

### **Abstract**

*This research has the objective to build map of public information service based on information technology in education field according to UU 14/2008 about Public Information Accessibility. The research method used is action research by doing observation on public agency website in the field of education by mapping information content on menu/submenu according to Permendiknas No. 50 / 2011 about public information service in Kemendiknas and determine public information content that is appropriate with UU No 14/2008. Based on the research, it is known that from 58 items of public information that should be provided, in fact there are only 17 items (29%) so that means still 71% items that are not available, and also the site characteristic of [www.kopertis6.or.id](http://www.kopertis6.or.id) in providing public information service limited in only displaying, but does not give interactive service yet.*

**Keywords :** public information, site, Kopertis 6

## **1. PENDAHULUAN**

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 50 tahun 2011 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pendidikan [1] dan Kebudayaan merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 [2][3] tentang Keterbukaan

Informasi Publik dalam bidang pendidikan, yang sejalan dengan salah satu agenda reformasi Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik yang mensyaratkan adanya akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses terjadinya kebijakan publik [4].

Badan Publik bidang pendidikan seperti Kementerian/Perguruan Tinggi Negeri/Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta/Unit Pelaksana Teknis, mempunyai kewajiban menyediakan layanan informasi publik yang sesuai dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 50 tahun 2011 pasal 19 ayat (1) yang berbunyi "Penyajian informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, secara serta merta dan tersedia setiap saat dapat disajikan dalam bentuk *soft copy* atau *hard copy* dalam situsnya.

Salah satu strategi dalam meningkatkan layanan pada situs pemerintah melalui empat tahap pengembangan yaitu katalogisasi, transaksi, integrasi vertikal, integrasi horisontal [5]. Pemanfaatan teknologi informasi untuk pelayanan publik telah diimplementasikan pada beberapa negara maju. *United Nations E-Government Survey Releases 2012* menempatkan Indonesia pada peringkat ke 7 dari 11 negara di Asia Tenggara dibawah Singapura, Malaysia, Brunei, Vietnam, Philipina dan Thiland [6].

Keberhasilan *e-Government* Pemerintah Singapura ditopang oleh empat komponen utama, yaitu isi informasi, infrastruktur ICT, infrastruktur *e-government*, dan promosi *e-government* [7]. Konsep penyajian informasi publik harus dilakukan dengan cara yang logis, konsisten, koheren dan mudah diakses sehingga setiap pengguna, meskipun tanpa pengetahuan internet memadai sekalipun, dapat memperoleh informasi serta menggunakan layanan *on-line* [8]. Kanal informasi *e-Government* yang terbaik merupakan situs pemerintah yang informatif, komprehensif dan efektif, terintegrasi dengan kuat, mampu memuat informasi yang luar biasa besar,

menyediakan fitur yang lengkap dan memanfaatkan semua teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini dikemukakan oleh [9] dalam penelitiannya yang berjudul Portal-Portal *e-Government* terbaik di dunia.

Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VI, yang berkedudukan di Semarang serta mempunyai wilayah kerja Provinsi Jawa Tengah memiliki situs resmi yang beralamatkan: <http://www.kopertis6.or.id> dan beroperasi mulai bulan Maret 2011, sampai sekarang telah dikunjungi oleh lebih dari 600.000 (enam ratus ribu) pengunjung, hal ini menunjukkan bahwa minat serta keingintahuan masyarakat terhadap Kopertis VI cukup tinggi, sehingga tentunya harus direspon dengan selalu meng-update informasi serta meningkatkan layanan melalui situs tersebut.

Dalam rangka untuk meningkatkan kualitas informasi serta layanan pada situs Kopertis VI serta melaksanakan amanat UU No. 14 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap situs yang terkait dengan ketentuan undang-undang tersebut serta memelihara informasi dan membuat informasi tersebut mudah diakses melalui suatu sistem yang terkomputerisasi yang disebut sistem basis data [10] yang harus memenuhi sifat unik, standar, lengkap, permanen, dan terintegrasi [11].

## 2. METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah metode *action research*. Tahapan kegiatan yang dilakukan adalah : 1) mengidentifikasi kondisi layanan publik pada website Kopertis Wilayah VI Jawa Tengah

(<http://www.kopertis6.or.id>), dengan cara studi pustaka dan dokumentasi sehingga dapat disusun suatu kuesioner yang menghasilkan data-data layanan informasi publik di PTS Kopertis Wilayah VI serta dengan diskusi terarah dengan pihak Kopertis, beberapa PTS, Komisi Informasi Publik Provinsi Jawa Tengah serta pihak-pihak lain yang berkompeten, 2) memetakan layanan informasi publik pada PTS, dengan cara observasi situs Kopertis Wilayah VI. Observasi dilakukan untuk membuat peta situs (sitemap) serta jenis layanan yang disediakan melalui situs tersebut serta melakukan pemetaan terhadap konten informasi serta layanan situs Kopertis Wilayah VI terhadap ketersediaan informasi publik sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI No. 50 tahun 2011 [1]. Ketersediaan informasi publik yang dimaksud adalah : informasi yang wajib disediakan dan diumumkan badan publik secara berkala, informasi yang wajib disampaikan secara serta merta dan informasi yang wajib tersedia setiap saat. Setelah itu dilakukan analisis komparasi hasil observasi dengan UU 14/2008 [2] tentang Keterbukaan Informasi Publik.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Hasil

Hasil observasi yang dilakukan terhadap situs Kopertis Wilayah VI (<http://www.kopertis6.or.id>), menghasilkan peta situs seperti pada tabel 1

**Tabel 1:** Peta situs Kopertis Wilayah VI

No	Nama Menu	Kode	Jumlah Sub Menu
1	Menu Utama	A	6
2	Directory	B	10
3	Community	C	2
4	Materi Pelatihan	D	1
5	Buku Profile	E	1
6	e-Jurnal Kopertis	F	5
7	Jurnal PTS Jateng	G	1
8	Digilib PTS Jateng	H	1
9	Situs PTS Jateng	I	1
11	SK Inpassing	K	1
12	e-Jurnal Dikti	L	3
13	Arsip Artikel	M	5
14	Panduan	N	4
15	Links	O	11
16	Info Legalisir	P	1
17	Beasiswa Dosen	Q	2
18	Profil PNS	R	1
19	Media Dikti	S	1

Sedangkan hasil pemetaan konten/jenis informasi publik pada menu/sub menu situs Kopertis Wilayah VI yang sesuai dengan Permendiknas No 50 tahun 2011 [1] tentang layanan informasi publik di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tersaji dalam tabel 2.

**Tabel 2:** Jenis Informasi Publik sesuai Permendiknas No 50 tahun 2011

No	Jenis Informasi	Sub Jenis	Jumlah
1	Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala	- Informasi profil badan publik	3
		- Ringkasan informasi program/kegiatan	9
		- Ringkasan informasi kinerja badan publik	1
		- Ringkasan informasi keuangan	4
		- Ringkasan laporan akses informasi publik	4
		- Informasi peraturan, keputusan, kebijakan yang berdampak pada publik	2
		- Informasi tentang hak dan tata cara mengakses informasi publik	1
		- Informasi tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran pejabat	1
		- Informasi pengadaan barang dan jasa	1
		- Informasi prosedur peringatan dini dan evakuasi keadaan darurat	1
2	Informasi publik yang wajib diumumkan secara serta merta		1
3	Informasi yang wajib tersedia setiap saat		16
4	Daftar informasi publik		7
5	Informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau kebijakan unit kerja di lingkungan PPID		6
6	Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan		6

### 3.2 Pembahasan

Untuk dapat mengevaluasi sejauh mana suatu badan publik telah memanfaatkan situs sebagai sarana penyampaian dan menyediakan layanan informasi publik sesuai ketentuan UU No 14/2008 [2] tentang Keterbukaan Informasi Publik, ada dua aspek yang perlu diperhatikan, yakni :

1. Konten informasi publik pada situs
2. Layanan yang disediakan oleh situs

#### 3.2.1 Konten Informasi Publik

Konten informasi publik pada suatu situs Kopertis Wilayah VI, dapat dilihat dengan cara memetakan konten informasi pada menu /sub menu berdasarkan Permendiknas No 50 tahun 2011 [1] tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan. Konten informasi publik sesuai UU No 14/2008

[2] tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah :

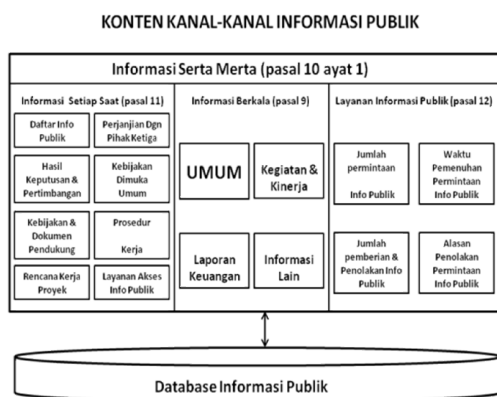
1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan badan publik secara berkala berdasarkan Permendiknas No 50 tahun 2011 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan. Dari 27 item informasi publik yang harus disediakan, situs Kopertis VI sudah memuat 7 item (26%).
2. Informasi yang wajib disampaikan secara serta merta berdasarkan Permendiknas No 50 tahun 2011 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan. Situs Kopertis VI sudah menyediakan fasilitas untuk menampilkan informasi yang

sifatnya darurat, serta-merta serta mendadak.

- Informasi yang wajib tersedia setiap saat berdasarkan Permendiknas No 50 tahun 2011 ten tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan. Dari 29 item informasi publik yang harus disediakan, situs Kopertis VI sudah memuat 9 item (31%).

Dari hasil pemetaan isi situs Kopertis Wilayah VI Jawa Tengah dengan ketentuan UU 14/2008 yang diatur lebih lanjut dalam Permendiknas No 50 tahun 2011 didapat kesimpulan bahwa dari 58 item informasi publik yang harus disediakan, ternyata hanya terdapat 17 item yang tersedia (29 %) sehingga masih terdapat 71 % item informasi publik yang belum tersedia.

Berdasarkan ketentuan UU 14/2008 [2], secara umum model konten informasi publik dapat dirumuskan sebagai berikut :



**Gambar 1.** Model Konten Informasi Publik

### 3.2.2 Layanan Informasi Publik

Pemanfaatan situs sebagai sarana untuk menyediakan layanan informasi publik tentunya harus mengacu pada Peraturan Komisi Informasi No 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi

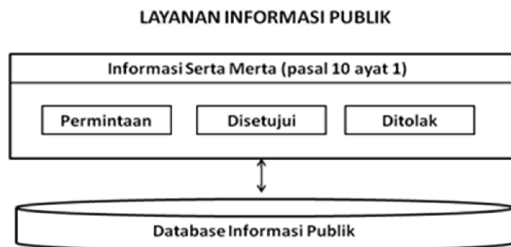
Publik pasal 10 ayat (2) yang berbunyi : Badan Publik negara wajib mengumumkan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sekurang-kurangnya melalui situs resmi dan papan pengumuman dengan cara yang mudah diakses oleh masyarakat. Data pemohon informasi publik sekurang-kurangnya adalah : identitas pemohon, jenis dan tujuan penggunaan informasi serta jenis permohonan apakah cukup melihat atau mendapatkan salinan. Sedangkan jawaban badan publik terhadap pemohon informasi publik, sekurang-kurangnya mencantumkan : jawaban terhadap permintaan, waktu pemberian informasi serta biaya dan cara pembayaran informasi publik. Berikut ini adalah kondisi layanan informasi publik pada situs Kopertis Wilayah 6 berdasarkan Peraturan Komisi Informasi No 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

**Tabel 3:** Kondisi Layanan Informasi Publik pada Situs Kopertis 6

No	Fitur Situs Kopertis Wilayah VI	Tersedia Ya Tidak
1	Menu permohonan informasi publik	√
2	Identitas pemohon informasi publik	√
3	Jenis dan tujuan penggunaan informasi	√
4	Jenis permohonan (lihat/salinan)	√
5	Jawaban terhadap permintaan	√
6	Waktu pemberian informasi	√
7	Biaya dan cara pembayaran informasi public	√

Berdasarkan ketentuan UU 14/2008, secara umum model layanan informasi

publik dapat dirumuskan sebagai berikut :



Gambar 2. Model Layanan Informasi Publik

## 5. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang dilakukan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dari 58 item informasi publik yang harus disediakan, ternyata hanya terdapat 17 item yang tersedia (29 %) sehingga masih terdapat 71 % item informasi publik yang belum tersedia.
2. Sifat situs [www.kopertis6.or.id](http://www.kopertis6.or.id) dalam memberikan layanan informasi publik masih sebatas menampilkan, namun belum memberikan layanan yang bersifat interaktif.
3. Mengingat ada informasi publik yang bersifat dinamis, maka dibutuhkan database untuk mendukung layanan informasi publik berbasis TI.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] -----, 2011. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI No. 50 tahun 2011 Tentang Layanan Informasi Publik Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan.
- [2] -----, 2008. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Jakarta.
- [3] -----, 2010. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Jakarta
- [4] Effendi, Sofian. 2009. "Agenda Reformasi Birokrasi Pemerintahan Yang Responsif, Efisien, Efektif", Makalah pada Seminar Nasional Reformasi Birokrasi, Jakarta.
- [5] Heng, Wang & Jinchang, Hou. 2010. "An Integrated Approach to Developing a Successful one-stop Portal e-Government". Paper in Computer Science and Information Technology IEEE International Conference, Chengdu.
- [6] United Nations, 2012. "E-Government Survey 2012 : E-Government for the People". <http://www.unpan.org/e-government>. Viewed April, 2 2012.
- [7] Chan, Lau, Pan 2008 , "E-government implementation: A macro analysis of Singapore's e-government initiatives".
- [8] Banciu, Diona. (2009), "e-Romania-A Citizens' Gateway towards Public Information". National Institute for Research and Development in Informatics – ICI. Bucharest
- [9] Sutrisno, Ashari & Istiyanto, Jazi Eko. 2009. "Portal-Portal e-Government Terbaik Di Dunia". Proceeding pada Seminar Nasional Informatika 2009 UPN "Veteran", Yogyakarta.

- [10] Date, C.J., 1995, *An Introduction to Database System*, Vol 1 7 th Edition, Addison Wesley.
- [11] Sutanta, E., 2011, “Model Integrasi Database Penduduk Indonesia Dengan Berbagai Sistem Informasi Berbasis Komputer”, *Jurnal Informatika*.